

# Perspektif antikorupsi: bagaimana celah izin menjadi pintu masuk *state capture*

---

Ferdian Yazid

---

## Tentang Kami



Transparency International Indonesia (TII) merupakan salah satu chapter Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 100 chapter lainnya, TII berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia.

TII memadukan kerja-kerja *think-tank* dan gerakan sosial. Sebagai *think-tank* TII melakukan review kebijakan, mendorong reformasi lembaga penegak hukum, dan secara konsisten melakukan pengukuran korupsi melalui Indeks Persepsi Korupsi (IPK/CPI), Transparency in Corporate Reporting (TRAC), dan berbagai publikasi riset lainnya. Di samping itu TII mengembangkan Pakta Integritas sebagai sistem pencegahan korupsi di birokrasi pemerintah.

Sebagai gerakan sosial, TII aktif terlibat dalam berbagai koalisi dan inisiatif gerakan antikorupsi di Indonesia. TII juga merangkul mitra lembaga lokal dalam melaksanakan berbagai program di daerah. Jaringan kerja ini juga diperluas dengan advokasi bahaya korupsi kepada anak-anak muda di berbagai Universitas di Indonesia.

Staf TII terdiri dari beragam latar belakang, mulai dari Ekonomi, Hukum, Komunikasi, hingga Kriminologi, masing-masing dengan keahliannya yang saling bersinergi untuk mendorong kemajuan kerja-kerja advokasi TII.

## Mengapa negara memberikan izin pengelolaan hutan kepada pihak swasta



- Meningkatkan **pendapatan negara**
- Menjamin **pasokan bahan baku industri** demi **kemakmuran rakyat**
- Menciptakan **lapangan kerja**
- PDB 2017: Kehutanan menyumbang 0,7% PDB Nasional, atau hanya 6,19% terhadap PDB sektor SDA
- PBB: hanya 8.000 per hektare
- Walhi & Auriga (2022): **92%** lahan ke korporasi, hanya **8%** ke rakyat

## Bagaimana perizinan menjadi pintu masuk korupsi kebijakan dan *state capture* di sektor kehutanan



- Skema izin menentukan **siapa** yang boleh mengakses, menguasai, dan memanfaatkan hutan
- KPK: Biaya suap izin hingga 22 miliar per tahun
- State Capture: Kelompok kepentingan tertentu mengambil kendali atas institusi dan proses pembuatan kebijakan publik
- Tiga pilar *state capture* (Liz David Barrett, 2024):
  - ***Influencing the formation of law and policy***
  - ***Influencing the implementation of policy***
  - ***Disabling the accountability institutions***

## Bagaimana perizinan menjadi pintu masuk korupsi kebijakan dan *state capture* di sektor kehutanan (2)



- 82 % calon kepala daerah mengakui dibiayai oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu

Harapan Penyandang Dana	Persentase
Kemudahan Perizinan	95,4%
Kemudahan untuk terlibat dalam tender	90,7%
Keamanan menjalankan bisnis	84,8%
Kemudahan akses untuk menjabat	81,5%
Kemudahan akses untuk menentukan kebijakan	72,2%
Prioritas bantuan langsung	62,3%
Prioritas bantuan sosial/hibah APBD	56,3%

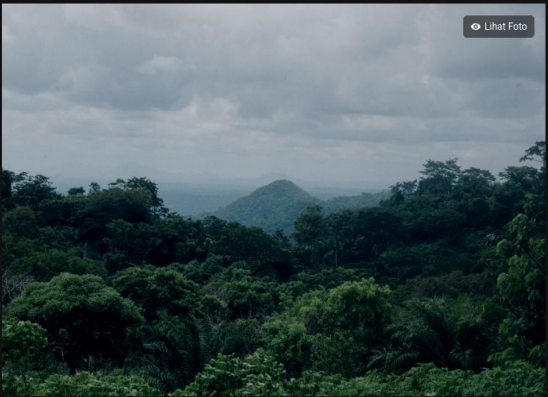
# Bagaimana Percepatan Investasi tanpa penguatan kontrol meningkatkan risiko penyalahgunaan diskresi



**Menhut Raja Juli Soroti Lemahnya Pengawasan Hutan di Daerah, Anggaran dan Personel Terbatas**

Kompas.com, 17 Desember 2025, 15:15 WIB

Zintan Prihatini, Ni Nyoman Wira Widyanti  
Tim Redaksi



Menteri Kehutanan Raja Juli soroti minimnya anggaran dan personel pengamanan hutan di Aceh dan Bengkulu. (Freepik/wirestock)


**JAKARTA, KOMPAS.com** - Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni mengatakan, 3,5 juta hektar hutan di Aceh hanya dijaga oleh 62 polisi hutan (polhut). Dengan kondisi tersebut, ia menilai praktik penebangan ilegal atau pembalakan liar nyaris tidak terhindarkan.

"Bagaimana kita berharap hutan di Aceh dapat dijaga, tidak ada *illegal logging* dengan perlindungan juga dari sama-sama kita tahu, ada APH (aparatus penegak hukum) juga kerap ada di sana. Tetapi kemudian kita berharap kalau hutan kita di Aceh baik-baik saja, kan harus ada perubahan," ujar Raja Juli dalam Lokakarya Nasional di Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).

Ad closed by Google

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com

Unduh Kompas.com / untuk berita terkini, akurat dan terpercaya setiap



Arahkan kamera ke kode QR untuk download app

- Dominasi Paradigma Ekonomi atas Perlindungan Ekosistem
- Diskresi Berlebih dan Ketidakjelasan Target
- Mekanisme "*Backdooring of the Law*" (Berenschot et al, 2023). Misalkan: Pemutihan Pelanggaran Pasal 110A dan 110B UU Cipta Kerja
- Proses Teknokrasi yang "*Legal but not Legitimate*"



GREENPEACE

## SHINING LIGHT ON THE SHADOWS

TOWARDS A UNIFORM  
METHODOLOGY FOR  
ESTABLISHING COMMON  
CORPORATE CONTROL

Pola konflik kepentingan:

- Ijon Politik & Balas Budi
- Pejabat sekaligus Pelaku Usaha
- Revolving Door

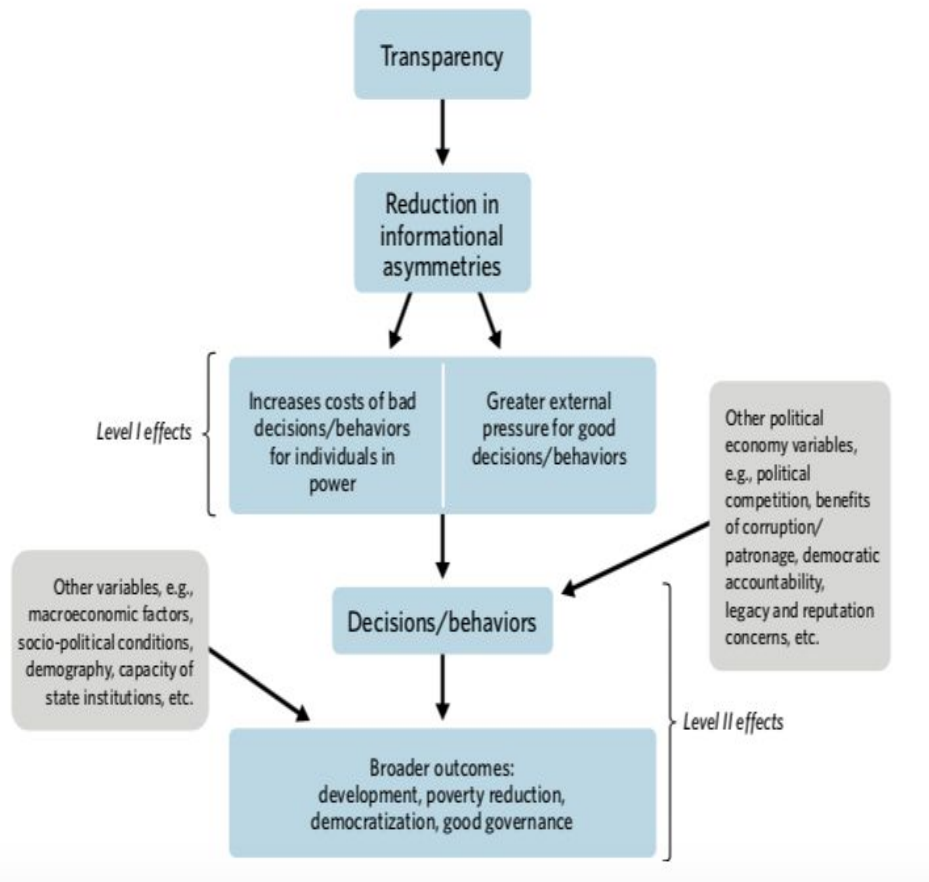
Praktik *Nominee* (Pinjam Nama):

- Penggunaan Perusahaan Cangkang (*Shell Companies*)
- Pemasok "Independen" Palsu
- Struktur Berlapis dan Negara Suaka Pajak:

# Keterbukaan data izin & BO dan Integrasi Pengawasan Publik Penting sebagai Instrumen Pencegahan Korupsi



FIGURE 2.1: Gillies and Heuty's (2011) Model of the Ideal Impact of Transparency



- Deteksi Konflik Kepentingan: Membongkar Relasi Pejabat dan Pemohon Izin
- Menutup Celah Suap dalam Proses Perizinan, Mencegah *Backdooring*
- Instrumen Pengawasan dan Partisipasi Publik
- Menjerat Pelaku Utama (*Ultimate Beneficial Owner*)
- Optimalisasi Penerimaan Negara



Terima kasih



**TRANSPARENCY  
INTERNATIONAL**

 **Indonesia**

the global coalition against corruption